

## Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Pelayanan Berbasis Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Daerah di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman

Betty Indriati<sup>1</sup>, Supardal<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD dan Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225, Indonesia

Korespondensi Penulis: [betty.indriati@gmail.com](mailto:betty.indriati@gmail.com)

### Informasi:

**Article History;**

**Received:**

13/04/2023

**Revised:**

10/05/2023

**Accepted:**

25/06/2023

**Abstrak:** Pada era digital ini dituntut pengelolaan administrasi pemerintahan yang cepat, efisien, efektif, dan akuntabel. Masyarakat di era digital lebih menuntut pelayanan yang cepat dan sederhana. Pemerintah Kabupaten Sleman juga tidak menutup mata bahwa era digital adalah sebuah keniscayaan, termasuk didalamnya digitalisasi dalam proses administrasi pemerintahan melalui digitalisasi dalam pengelolaan kearsipan. Terdapat 2 (dua) hal yang mendorong proses digitalisasi ini yaitu keterbatasan personil dalam pengelolaan kearsipan dan tuntutan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Sleman sangat concern dalam digitalisasi pengelolaan kearsipan melalui pengembangan SIMARDA (Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Daerah). Tujuan penerapan SIMARDA adalah mewujudkan tertib arsip pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, meningkatkan kinerja birokrasi melalui inovasi sistem administrasi persuratan, serta mendukung e-government Kabupaten Sleman menuju Smart Regency. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan SIMARDA menghasilkan potensi efisiensi melalui efisiensi anggaran belanja alat tulis kantor, penjilidan, penggandaan dan kebutuhan ruang penyimpanan. Efektivitas melalui SIMARDA terwujud dalam proses administrasi yang dapat berjalan sampai dengan akhir proses sesuai dengan maksud dan tujuan dari setiap surat yang dikeluarkan serta tidak tergantung pada keberadaan pimpinan di kantor. SIMARDA mewujudkan akuntabilitas melalui terpantaunya setiap proses administrasi yang berjalan.

**Keyword:** *Digital, Simarda, Efisiensi, Efektivitas, Akuntabilitas*

### PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan menjadi suatu hal yang krusial di era keterbukaan informasi dan transparansi publik. Di era yang serba digital ini, pemerintah dituntut untuk dapat mengembangkan akses informasi yang cepat dan mudah semata mata ditujukan untuk kepentingan masyarakat, sehingga dapat menunjukkan tingkat tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Tata kelola pemerintahan atau biasa disebut *good governance* adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Sedarmayanti, 2007).

Hal ini sejalan dengan visi besar dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin adalah mewujudkan Indonesia Maju dengan menekankan 5 (lima) sasaran prioritas pembangunan yang salah satunya adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah dengan menjamin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang fokus, tepat sasaran, serta mengedepankan orientasi hasil, bukan lagi output. Setiap kegiatan yang dibiayai oleh anggaran negara hendaknya dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat (Humas MenPAN, 2020).

Namun pada perjalanannya, praktek efisiensi dan efektivitas pemerintahan ternyata belum sesuai dengan teori atau kondisi ideal. Terbukti masih banyaknya kritikan terhadap pemerintah berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah hanya sibuk dengan urusan internal yang mengakibatkan urusan pelayanan kepada publik terabaikan. Pelayanan publik yang buruk memberikan kesan bahwa pemerintah tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat. Meskipun saat ini sudah banyak perubahan dan inovasi yang dilakukan pemerintah, namun kritikan terhadap pelayanan publik yang berkualitas akan semakin tinggi pula seiring meningkatnya tingkat kehidupan masyarakat (Yustinus Paat, 2018).

Salah satu sumber inefisiensi dan inefektivitas penyelenggaraan pemerintahan bersumber dari belum maksimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan yang bersumber pada belum optimalnya pengelolaan kearsipan. Karena system pelayanan masih bersifat manual dan tradisional, sehingga pelayanan belum bisa dilakukan secara cepat dan terukur.

Tidak dipungkiri bahwa pengelolaan kearsipan saat ini masih ditemui banyak permasalahan, salah satunya masih dilakukan secara konvensional atau manual yang melelahkan dan merepotkan bagi pengguna layanan. Para petugas kearsipan dalam melakukan pengelolaan arsip seperti pencatatan baik surat masuk maupun surat keluar masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, sisi efisiensi masih perlu ditingkatkan dalam penggunaan belanja daerah untuk operasional kantor. Salah satu penyebab belum efisiennya penggunaan anggaran dikarenakan praktek pengelolaan persuratan masih dilaksanakan secara manual. Imbas dari belum efisiensinya pengelolaan persuratan, maka berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan kegiatan. Sisi ketidakefektifan tampak dari masih diperlukannya banyak sumber daya dalam pengelolaan persuratan, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip.

Oleh karena itu, teknologi informasi bidang kearsipan memberikan peran penting dalam rangka menjawab permasalahan yang ada untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan karena telah menjadi sebuah tuntutan, bukan pilihan. Dalam kajian ingin mendeskripsikan secara naratif dan mendalam dampak penggunaan E-government khususnya Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Daerah (SIMARDA) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sleman.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sleman, khususnya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sleman. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif yakni ingin menggambarkan secara naratif penerapan SIMARDA bagi peningkatan efisiensi dan

efektivitas pelayanan kearsipan. Menurut Denzin dan Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis secara mendalam atas fenomena yang diteliti. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian ini dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Sedangkan penelitian deskriptif menggambarkan suatu hasil penelitian dengan tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti. Akhirnya akan diperoleh hasil dan temuan terkait pelaksanaan SIMARDA dan dampaknya bagi peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan kearsipan di Kabupaten Sleman.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Era digital tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan teknologi informasi, oleh karena itu, dalam perkembangannya menghasilkan tatanan kehidupan masyarakat secara digital. Masyarakat digital adalah masyarakat yang terhubung dengan jaringan teknologi, sehingga mempengaruhi pola interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Castells (2004) menyebutkan bahwa, dalam masyarakat digital struktur sosialnya adalah jaringan dengan mikro-elektronik berbasis informasi digital dan teknologi komunikasi. Pemahaman ini kemudian berkembang dan banyak digunakan para sosiolog dalam mengamati perubahan perilaku dan interaksi manusia modern.

Seiring perkembangan teknologi, masyarakat digital melahirkan tuntutan pelayanan publik secara digital pula. Pelayanan publik secara digital akan mengubah dan mengurangi penggunaan tenaga manusia dan material-material fisik dalam proses pelayanan publik termasuk didalamnya dalam pengelolaan administrasi pemerintahan.

Pada era digital ini dituntut pengelolaan administrasi pemerintahan yang cepat, efisien, efektif, dan akuntabel. Masyarakat di era digital lebih menuntut pelayanan yang cepat dan sederhana. Disisi lain, digitalisasi dalam pengelolaan administrasi pemerintahan juga menjawab keterbatasan dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun prasarana dan sarana yang dimiliki pemerintah di tengah tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik. Digitalisasi dalam administrasi pemerintahan setidaknya akan menjawab 3 (tiga) tuntutan yaitu efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Efisiensi diperoleh dari meminimalkan kebutuhan sumber daya baik sumber daya manusia maupun prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam proses administrasi. Efektivitas terwujud dalam pencapaian tujuan proses administrasi, sedangkan akuntabilitas terwujud dalam kejelasan proses administrasi.

Menengok ke kurun waktu 10 (sepuluh) tahun yang lalu kondisi arsip masih diciptakan dalam bentuk manual atau konvensional. Semua surat diciptakan dalam bentuk kertas, terlebih untuk kepentingan pertanggungjawaban di bidang keuangan. Sehingga dapat kita bayangkan kondisi kearsipan saat ini dari imbas pengelolaan kearsipan 10 (sepuluh) tahun yang lalu adalah penumpukan arsip. Terlebih lagi jika pengelolaan kearsipan tidak disertai dengan

penyusutan arsip secara rutin, maka akan banyak efek samping dari hal tersebut. Efek dari penumpukan arsip ini antara lain sulit ditemukan apabila dicari, mudah hilang, penataan tidak teratur, kebutuhan sarana dan prasarana kearsipan yang cukup banyak, dan lain sebagainya.

Kondisi ini berimbas pada banyaknya keluhan dari masyarakat akan pelayanan pemerintah. Pengelolaan kearsipan yang tidak teratur berakibat pada ketidakjelasan proses pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat menjadi tidak terukur dan terasa berbelit-belit salah satunya karena pengelolaan kearsipan yang tidak dapat dipantau alur penyelesaiannya. Banyak kasus hukum yang menimpa pemerintah atau aparatur pemerintah juga disebabkan karena pengelolaan kearsipan yang belum baik. Sebagai contoh kasus hilangnya aset pemerintah, hilangnya dokumen-dokumen bersejarah, gugatan atau aduan dari masyarakat terkait pelayanan publik atau bahkan adanya kasus korupsi yang marak terjadi saat ini.

Secara fisik, pengelolaan arsip yang masih konvensional menuntut adanya tempat penyimpanan arsip yang cukup besar, sementara disisi lain kebutuhan ini tidak mudah untuk dipenuhi karena keterbatasan anggaran pemerintah. Akibatnya adalah arsip tidak tertata dan tersimpan dengan baik yang berimbas pada kerusakan arsip, padahal di sisi lain arsip adalah bukti rekaman kegiatan atau peristiwa yang terjadi pada proses administrasi pemerintahan. Kondisi inilah yang mendorong Presiden Joko Widodo untuk menggulirkan pengelolaan arsip secara digital dengan meninggalkan cara-cara lama dalam pengelolaan arsip yang tidak efisien, sulit ditemukan dan tidak terintegrasi.

Guna menjawab tuntutan ini khususnya pada aspek administrasi pemerintahan, maka pemerintah harus segera melakukan transformasi pengelolaan kearsipan ke arah digital. Transformasi pengelolaan kearsipan ke arah digital pada hakekatnya adalah perubahan pelayanan administrasi pemerintahan dari konvensional menjadi digital, dimana pengelolaan kearsipan mencakup penciptaan arsip baik pembuatan surat maupun penerimaan surat, proses berjalannya persuratan, penyimpanan hingga pemberkasan.

Konsep digitalisasi pemerintahan atau biasa disebut dengan e-government di Pemerintah Kabupaten Sleman digaungkan dengan pencanangan konsep Smart City di Kabupaten Sleman. Pengembangan dan penerapan konsep Smart City di Kabupaten Sleman sudah dimulai sejak tahun 2016 dengan menuangkan Smart Regency ke dalam visi Kabupaten Sleman yaitu Terwujudnya Masyarakat Sleman Yang Lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya Sistem E-Government Menuju Smart Regency (Kabupaten Pintar) Pada Tahun 2021.

Faktor yang mendorong Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menggaungkan *e-government* melalui konsep *Smart City* adalah bahwa Kabupaten Sleman sebagai kota tujuan pendidikan serta daerah pengembangan pemukiman/perumahan memiliki konsekuensi adanya pertambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Disisi yang lain, daya dukung sumber daya alam di wilayah Kabupaten Sleman sangat terbatas dan tidak mungkin bertambah. Pemerintah Kabupaten Sleman juga tidak menutup mata bahwa era digital adalah sebuah keniscayaan, termasuk didalamnya digitalisasi dalam proses administrasi pemerintahan melalui digitalisasi dalam pengelolaan kearsipan.

Terdapat 2 (dua) hal yang mendorong proses digitalisasi ini yaitu keterbatasan personil dalam pengelolaan kearsipan dan tuntutan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Efisien dalam mengantisipasi kekurangan personil dan teknologi adalah jawaban salah satunya. Efektif dalam hal tujuan surat pasti sampai, tidak ada lagi alasan surat tidak sampai, yang ada adalah surat belum dibaca. Sisi akuntabilitasnya dalam hal kita dapat mengetahui proses surat sampai dimana, seperti halnya kita belanja online, kapan surat dibuat, kapan surat diparaf, kapan surat ditanda tangani, kapan surat dikirim, siapa yang menerima, kapan dilakukan disposisi, kapan ditindaklanjuti, sudah menuangkan laporan hasil tindak lanjut apa belum, disitu akan nampak jejak digitalnya.

Seiring dengan teknologi informasi pemerintahan khususnya bidang kearsipan yang saat ini telah menjadi kebutuhan yang wajib diterapkan, maka Pemerintah Kabupaten Sleman juga menginisiasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 40.2 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Daerah (SIMARDA) di mana didalamnya mengatur tentang sistem pengelolaan arsip secara elektronik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. SIMARDA merupakan aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan arsip dinamis bagi pencipta arsip sesuai amanat Peraturan Bupati Sleman Nomor 40.2 Tahun 2020 tentang SIMARDA.

Tujuan penerapan SIMARDA adalah mewujudkan tertib arsip pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, meningkatkan kinerja birokrasi melalui inovasi sistem administrasi persuratan, serta mendukung *e-government* Kabupaten Sleman menuju *Smart Regency*.

Pemerintah Kabupaten Sleman sangat concern dalam digitalisasi pengelolaan kearsipan melalui pengembangan SIMARDA. Dukungan pimpinan dalam penerapan digitalisasi kearsipan sangatlah mutlak karena proses bisnis pengelolaan arsip secara digital diawali dari disposisi secara digital oleh pimpinan. Dukungan dari pimpinan ini muncul tentu saja karena adanya kesadaran akan pentingnya memulai pengelolaan arsip secara digital dalam rangka mendukung efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Disamping dukungan pimpinan, Pemerintah Kabupaten Sleman juga sangat komitmen dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas administrasi pemerintahan melalui transformasi kearsipan secara digital khususnya melalui SIMARDA.

Hal ini tampak dalam kebijakan perencanaan penganggaran di Bappeda Kabupaten Sleman, dimana dalam penyusunan perencanaan kabupaten, Bappeda berkomitmen untuk mendukung efisiensi anggaran operasional administrasi dengan penggunaan SIMARDA.

Guna mendukung transformasi kearsipan ke era digital, diperlukan kegiatan-kegiatan pendukung ini karena transformasi kearsipan ke era digital ini merupakan perubahan cara kerja yang akan berimbas pada perubahan perilaku. Kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman selaku leading sector dalam transformasi kearsipan di era digital antara lain:

### **Peningkatan kapasitas pengelola kearsipan**

Kegiatan peningkatan kapasitas pengelola kearsipan ini dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis dan sosialisasi. Bimbingan teknis yang dilaksanakan berupa penjelasan konsep aplikasi SIMARDA, sedangkan sosialisasi dilaksanakan untuk menyampaikan perkembangan-perkembangan (update) aplikasi SIMARDA sesuai dengan peningkatan kebutuhan pengelolaan kearsipan secara digital.

### **Pengembangan infrastruktur**

Pengembangan infrastruktur ini dimaksudkan sebagai penambahan fitur-fitur dalam aplikasi untuk menyempurnakan aplikasi SIMARDA agar semakin memudahkan dalam penggunaannya. Perkembangan simarda yang saat ini sudah masuk dalam versi 2 merupakan bentuk pengembangan infrastruktur dimana sebelumnya dalam versi 1 belum terkoneksi dengan aplikasi WhatsApp sekarang sudah terkoneksi dengan aplikasi WhatsApp. Koneksi dengan aplikasi WhatsApp ini memungkinkan adanya notifikasi setiap ada aktivitas dalam SIMARDA.

### **Pemantauan penggunaan SIMARDA baik secara manual/cek lokasi atau digital**

Disamping sisi efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, ciri daripada penggunaan teknologi informasi bidang kearsipan adalah setiap aktivitas dapat dipantau. Begitu juga dalam penggunaan SIMARDA. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selaku admin di tingkat kabupaten senantiasa memantau pergerakan pengelolaan kearsipan secara digital. Dari hasil pemantauan ini dapat diketahui progress report dari setiap perangkat daerah dan dapat dideteksi di titik mana kendala muncul. Disamping itu, laporan pemantauan ini juga bisa menjadi pemicu bagi perangkat daerah yang belum maksimal dalam melaksanakan transformasi kearsipan secara digital.

### **Pembuatan WhatsApp grup**

WhatsApp grup menjadi ajang untuk berbagi permasalahan yang ditemui dalam penggunaan SIMARDA maupun berbagi tips dan trick yang dilakukan dalam penggunaan aplikasi SIMARDA. Disamping itu WhatsApp grup juga menjadi media menyampaikan informasi apabila ada perubahan-perubahan atau penambahan fitur dalam aplikasi SIMARDA.

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa penerapan SIMARDA dalam pengelolaan kearsipan ini dimaksudkan untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

### ***Efisiensi***

Sisi efisiensi mengacu pada penggunaan anggaran yang lebih sedikit dengan tidak mengurangi produktivitas. Mengingat penggunaan SIMARDA secara masif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman baru mulai pertengahan tahun 2022, maka efisiensi disini lebih kepada “potensi” efisiensi penggunaan anggaran. Potensi efisiensi ini dapat dilihat dari semakin berkurangnya kebutuhan alat tulis kantor, penjilidan, penggandaan, dan kebutuhan ruang penyimpanan arsip.

Disamping potensi efisiensi anggaran, efisiensi yang tidak kalah penting adalah potensi kebutuhan ruang penyimpanan arsip. Kebutuhan ruang penyimpanan arsip senantiasa menjadi keluhan dari setiap perangkat daerah. Dengan penciptaan arsip secara digital melalui SIMARDA, maka ke depan kebutuhan ruang penyimpanan arsip akan berkurang signifikan, sehingga dapat terwujud juga efisiensi kebutuhan anggaran untuk pembuatan maupun perawatan ruang penyimpanan arsip.

### ***Efektivitas***

Efektivitas bermakna bahwa pencapaian tujuan dari setiap kegiatan tercapai maksimal. Dengan penggunaan SIMARDA, maka proses administrasi dapat berjalan sampai dengan akhir proses sesuai dengan maksud dan tujuan dari setiap surat yang dikeluarkan, dengan kata lain tidak ada lagi surat yang tidak sampai tujuan. Kegiatan administrasi perkantoran juga tetap dapat berjalan tanpa tergantung pada keberadaan pimpinan di kantor. Apabila masih menggunakan surat secara manual, maka sering proses administrasi persuratan terhenti karena menunggu kehadiran pimpinan. Dengan aplikasi SIMARDA, maka pimpinan dapat melaksanakan disposisi darimana pun sehingga proses administrasi persuratan dapat tetap berjalan dan berimbas pada tetap maksimalnya pelayanan publik.

### ***Akuntabilitas***

Akuntabilitas dimaknai bahwa setiap proses kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipantau prosesnya. Dengan aplikasi SIMARDA, setiap persuratan dapat dipantau keberadaannya, proses yang sedang berjalan, hingga pelaporannya. Aplikasi SIMARDA memungkinkan setiap surat terpantau. Hal ini senada dengan komitmen presiden yang meminta agar arsip dapat dilacak dalam hitungan detik. Dalam aplikasi SIMARDA terdapat fitur “timeline”. Fitur ini memungkinkan pimpinan memantau perjalanan setiap surat.

SIMARDA sebagai aplikasi dalam pengelolaan persuratan secara digital sudah digunakan oleh seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. Perbedaan yang muncul terdapat dalam progress report dari masing-masing perangkat daerah dan belum maksimalnya pelaporan surat yang didisposisi.

Dari hasil rekapitulasi data, dapat dipetakan dimana letak “macetnya” penggunaan SIMARDA. Sebagai contoh, apabila surat yang sudah di disposisi berbanding lurus dengan surat yang masuk, maka pimpinan perangkat daerah sudah menerapkan transformasi kearsipan secara digital. Begitu pula sebaliknya, apabila jumlah surat terdisposisi masih jauh di bawah jumlah surat masuk, maka perlu di dorong komitmen pimpinan perangkat daerah agar mulai melakukan transformasi pengelolaan persuratan secara digital.

Penerapan SIMARDA di jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman dapat berjalan baik karena didukung oleh beberapa faktor, diantaranya:

### ***Komitmen pimpinan***

Jajaran pemerintah Kabupaten Sleman mulai dari Bupati dan pimpinan perangkat daerah sangat berkomitmen untuk melaksanakan transformasi kearsipan ke arah digital. Hal ini tampak dari data alur surat yang sudah terdisposisi secara digital.

### ***Dukungan infrastruktur teknologi informasi***

Perubahan pengelolaan kearsipan dari konvensional ke digital tentunya memerlukan dukungan infrastruktur teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Sleman sangat concern dalam peningkatan infrastruktur jaringan internet baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan perkantoran. Peningkatan infrastruktur internet ini dilakukan baik dengan dana APBD, kerjasama dengan Pemda DIY maupun dengan memanfaatkan CSR dari perusahaan swasta.

### ***Kerjasama antar stakeholder***

SIMARDA sebagai sebuah aplikasi perubahan pengelolaan kearsipan dari konvensional ke digital pada dasarnya adalah memindah bisnis proses pengelolaan arsip ke aplikasi. Oleh karena itu, tidak mungkin hanya diampu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sendiri. Dalam pengembangan aplikasi SIMARDA, setidaknya melibatkan Bagian Organisasi, Bagian Hukum dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Bagian Organisasi menyiapkan tata naskah dinas yang menjadi acuan format persuratan, Bagian Hukum menjamin legitimasi SIMARDA, dan Dinas Komunikasi dan Informatika menjamin kebutuhan infrastruktur jaringan dan aplikasi SIMARDA.

### ***Antusiasme Perangkat Daerah***

Antusiasme perangkat daerah dalam menerapkan SIMARDA ini dapat dilihat dari diskusi yang muncul dalam WhatsApp grup SIMARDA maupun pertanyaan yang disampaikan secara personal kepada admin SIMARDA di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Konsultasi dan diskusi menunjukkan bahwa perangkat daerah sudah menggunakan SIMARDA secara aktif sehingga mereka bisa menyampaikan kendala maupun berbagi temuan-temuan yang mereka dapatkan dalam penggunaan SIMARDA. Masukan dan informasi dari perangkat daerah ini tentunya sangat bermanfaat bagi penyempurnaan aplikasi SIMARDA.

Namun demikian dalam tahap awal penerapan SIMARDA tidak dapat dipungkiri ditemui kendala. Kendala yang dihadapi dalam penerapan SIMARDA sebagai model transformasi kearsipan berbasis digital di Pemerintah Kabupaten Sleman diantaranya:

### ***Minimnya dukungan anggaran***

Tidak dapat dipungkiri bahwa urusan kearsipan masih dipandang sebelah mata. Hal ini tentunya berimbas pada alokasi anggaran yang diperoleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Minimnya alokasi anggaran dinas tentunya berimbas pada minimnya alokasi anggaran untuk pengelolaan SIMARDA. Minimnya alokasi anggaran pengelolaan SIMARDA ini tentunya menghambat upaya pengembangan SIMARDA sebagai sebuah aplikasi.

### ***Sikap skeptis***

Sikap skeptis dari sebagian pimpinan maupun pelaksana tidak dapat dipungkiri masih menjadi kendala dalam penerapan SIMARDA. Hal ini terjadi karena mereka lebih merasa nyaman dengan pengelolaan persuratan secara fisik. Tidak sedikit jajaran pimpinan birokrasi yang pola pikirnya sulit untuk beranjak dari proses bisnis manual ke digital karena proses digitalisasi dalam *e-government* menuntut banyak perubahan dan anti kemapanan. Hal tersebut yang menjadikan perhatian pimpinan terhadap pembenahan tata kelola *e-government* di Kabupaten Sleman menjadi hal yang bukan prioritas, padahal berbagai manajemen yang diatur di dalam *e-government* sangat diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi melalui percepatan Transformasi Digital.

### ***Perubahan perilaku***

Tantangan tersebar dalam penerapan SIMARDA ada mengubah perilaku dari manual ke digital. Hal ini tentunya tidak mudah karena SIMARDA mengubah cara kerja dari yang tidak efisien menjadi efisien, dari yang tidak akuntabel menjadi akuntabel.

### ***Sarana pengelolaan kearsipan di perangkat daerah***

Sarana unit kearsipan di perangkat daerah juga masih perlu ditingkatkan. Hal ini diketahui berdasarkan penelusuran di beberapa perangkat daerah di mana masih ditemui perangkat daerah yang belum memiliki sarana prasarana yang memadai untuk mendigitalkan surat misalnya.

### ***Dukungan Sumber Daya Manusia di perangkat daerah***

Ketersediaan pengelola arsip yang memiliki latar belakang pendidikan kearsipan maupun teknologi informasi juga masih sangat kurang. Hal ini tampak dari data bahwa dari 48 (empat puluh delapan) perangkat daerah masih terdapat 32 (tiga puluh dua) yang pengelolaan kearsipannya belum berbackground kearsipan. Hal ini tentunya menjadi kendala dalam penerapan SIMARDA mengingat SIMARDA berbasis pada bisnis proses pengelolaan arsip secara manual.

### ***Persoalan hukum***

Pengakuan bukti digital dalam ranah hukum juga masih menjadi kendala, dimana bukti fisik masih menjadi alat pembuktian utama seperti kelengkapan dalam laporan keuangan.

### ***Kebijakan Pemerintah Pusat***

Masalah yang sering dihadapi dalam transformasi kearsipan di era digital terutama konflik antara kebijakan pusat dengan pemerintah daerah, dimana pemerintah pusat justru sering terlambat dalam mengembangkan aplikasi kearsipan, sementara di daerah sudah terlebih dahulu mengembangkan. Akibatnya muncul duplikasi aplikasi sehingga terjadi pemborosan anggaran. Kesiapan aplikasi pemerintah pusat juga menjadi kendala dimana aplikasi *e-government* yang dibuat oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan kebutuhan di daerah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Penggunaan teknologi bidang kearsipan melalui SIMARDA dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sleman. Potensi efisiensi yang diperoleh dari penggunaan SIMARDA adalah efisiensi kebutuhan anggaran untuk operasional pemerintahan dalam bentuk belanja alat tulis kantor, penjilidan dan penggandaan serta ke depan akan ada efisiensi kebutuhan ruang penyimpanan arsip.
2. Sisi efektivitas dengan penerapan SIMARDA akan diperoleh hasil berupa proses persuratan yang dapat dipastikan pencapaian tujuannya. Disamping itu ketepatan waktu yang terukur, sehingga proses bisa lebih cepat pada alamat yang dituju, serta kecil kemungkinan salah alamat dan sasaran yang dituju.
3. Kendala terbesar dalam penerapan SIMARDA adalah mengubah perilaku kerja dari sistem manual ke digital, atau mengubah budaya birokrasi tradisional ke system

birokrasi virtual. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya penguatan kapasitas birokrasi berbasis ICT, dan terus menerus dilakukan upaya yang sifatnya “memaksa” untuk mempercepat proses transformasi pengelolaan kearsipan secara digital.

## **REFERENCE**

- Abel Rizky Siregar1, & Roy Valiant Salomo. (2020). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, 5.
- Albi Anggito, & Johan Setiawan, S. P. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. (Lestari Deffi Ella, Ed.). Sukabumi, Jawa Barat: CV. Jejak.
- Burhan Bungin. (2011). Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya).
- Fergie Joanda Kaunang, Abdul Karim, Janner Simarmata, Akbar Iskandar, Dewa Putu Yudhi Ardiana, Ri Sabti Septarini, ... Reni Dwi Widyastuti. (2021). Konsep Teknologi Informasi. (Watriathos Ronal, Ed.). Yayasan Kita Menulis.
- Humas MenPAN. (2020). Efektivitas dan Efisiensi Instansi Pemerintah Harus Dilakukan Secara Konsisten. [www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id). Jakarta.
- Idrus, Muhammad. (2009). Metode Penelitian Ilmu Sosial; Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Dalam Edisi Kedua. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Intan Pitaloka. (2022, Juni 28). Wujudkan pemerintahan yang efektif.
- Janner Simarmata, Melda Agnes Manuhutu, Devi Yendrianof, Akbar Iskandar, Muhammad Amin, Alfry Aristo J Sinlae, ... Ni Luh Wiwik Sri Rahayu. (2021). Pengantar Teknologi Informasi. (Watrianthos Ronal, Ed.). Yayasan Kita Menulis.
- Jansen & Rekan. (2021). Kunci utama efektivitas dan efisiensi pemerintah. [jansenrekan.com](http://jansenrekan.com).
- J.R. Raco. (2010). Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakter, dan Keunggulannya).
- Laudia Tysara. (2020, Mei 19). Jenis-jenis, Kenali Sifat dan Nilai Gunanya. [liputan6.com](http://liputan6.com).
- Muhammad Ramdhan. (2021). Metode Penelitian. (Effendy Amin Aidil, Ed.). Surabaya. Diambil dari (jurnal Penerapan Prinsip Efektif dan efisien dalam Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Penelitian, Taufik Hidayat, Lia Fitrianingrum, Kodar Hudiwasono, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung, dipublikasikan 28 Februari 2021
- Nasrullah. (t.t.). Implementasi Electronic Government Dalam Mewujudkan Good Governance dan Smart City (Studi Kasus: Pemerintah Kota Makassar).
- Nindya Aldila. (2021, Mei 4). Daerah Boros Belanja Pegawai. [bisnis.com](http://bisnis.com).

- prokomsetda. (1999). pengertian, prinsip, dan penerapan good governance di Indonesia. bulelengkab.go.id.
- Ridwan, M., Nurhakim, S., Bank, P. T., Pensiunan, T., Kantor, N., & Operasional, P. (2014). Implementasi e-goverment Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern.
- Rukin. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. (A. Rofiq, Ed.). Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Sedarmayanti. (2007). Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik). Bandung: Mandar Maju.
- Steers, R. M. (1985). Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku). Jakarta: Erlangga.
- Stoner, A. F. J. (1982). Manajemen. Jakarta: Diterjemahkan Erlangga.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D. Bandung: Alfabeta.
- Supardal, Achmad Nurmandi, Dewi Kurniasih, & Aulia Nur Lasiwi. (2020). Teknologi Informasi Pemerintahan. Yogyakarta: UMY Press.
- Sutirman. (2019). Administrasi Kearsipan di Era Teknologi Informasi. (S. Amalia, Ed.). UNY Press.
- Taufik Hidayat, Lia Fitrianingrum, & Kodar Hudiwasono. (2021). Penerapan Prinsip Efektif dan Efisien dalam Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Penelitian.
- Tri Rachmadi, S. K. (2020). Pengantar Teknologi Informasi.
- Wisnoe Moerti. (2013, September 12). Kritik Borosnya Anggaran Belanja Negara. merdeka.com.
- Yustinus Paat. (2018, Maret 30). Enam Penyakit Birokrasi di Indonesia. beritasatu.com.